



**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TENTANG
PENGECUALIAN RAHASIA BANK TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA”**

Oleh :

NESA HADI SUSANTO

NIM : 82337220011

PERSETUJUAN

Disetujui dan telah dipertahankan dalam sidang Tesis

Tanggal 10 Agustus 2024

Pembimbing I

Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H.,M.H.

NIK/NIDN : 3112770197/0428097801

Pembimbing II

Dr. Yogi Muhammad Rahman, S.H.,M.H.

NIK/NIDN : 0416129401

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Nesa Hadi Susanto

NIM : 82337220011

Tanggal Sidang : 10 Agustus 2024

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Perdata

Judul Tesis : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN

**MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TENTANG
PENGECUALIAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN
PERKARA HARTA BERSAMA”**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji serta diperkenankan untuk diperbanyak/dicetak.

No	Nama	Tanda Tangan
1	Dr. Ida Farida, S.H.,M.H.	
2	Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H.,M.H.	
3	Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si	

Mengetahui,

Direktur,

Ketua Program Studi,

Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si

Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H.,M.H.

NIK/NIDN. 3112770003/0408066701 NIK/NIDN. 3112770197/0428097801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nesa Hadi Susanto

NIM : 82337220011

Judul : “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012
TENTANG PENGECUALIAN RAHASIA BANK
TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA HARTA
BERSAMA”

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Galuh.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal’afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang Menyatakan,

Nesa Hadi Susanto

NIM :82337220011

ABSTRAK

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-X/2012 TENTANG PENGECCUALIAN RAHASIA BANK TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA HARTA BERSAMA”

NESA HADI SUSANTO
NIM : 82337220011

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 tentang pengecualian kerahasiaan bank untuk kepentingan perkara harta bersama, karena menilaipasal 40 ayat (1) Undang – Undang Perbankanberbenturan dengan Undang – Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 4 (jaminan perlindungan terhadap harta benda yang dibawah kekuasaannya serta tidak boleh diambil alih secara sewenang – wenang oleh siapapun).

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif, sebab bertujuan untuk meneliti asas – asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum, guna menganalisa terkait postulat normative tertentu dapat atau tidak dapat dipakai untuk menyelesaikan masalah hukum tertentu in concreto (*hukum dalam wujud putusan atau penetapan hakim*), yang bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang efektifitas Putusan MK tersebut, yang ternyata masih banyak kendala dalam penerapannya karena ketidaktahuan masyarakat maupun pihak perbankan mengenai putusan tersebut, disamping itu juga terdapat tumpang tindih aturan yang membuat putusan tersebut tidak efektif terhadap penyelesaian harta bersama yang masih dalam penguasaan perbankan. Dalam perkara pembagian harta bersama berbentuk tabungan yang dikuasai salah satu pihakperkara dapat terselesaikan karenakerahasiaan bank dapat dibuka, namun berkaitan dengan harta bersama yang masih dalam penguasaan perbankan, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, mengikat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam point III (Rumusan Kamar Agama) ayat (1d).

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh para pihakuntuk mendapatkan keadilan dalam menyelesaikan perkara harta bersama yang masih dalam penguasaan perbankan yakni melakukan musyawarah antara pihak suami – istri untuk menyelesaikan perkara tersebut diluar pengadilan, atau melakukan perjanjian pisah harta sebelum perceraian dilakukan. Selain itu jugaperan Pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengeluarkan peraturan baru untuk memperkuat isi yang termaktub dalam putusan tersebut, sebagai sebuah terobosan maupun solusi agar dapat memenuhi keadilan dan kepastian serta kemanfaatan hukum bagi masing-masing pihak dalam perkara yang berkaitan dengan pembagian harta bersama setelah perceraian.

Kata kunci :Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012, Kerahasiaan Bank Terhadap Harta Bersama, Penyelesaian Perkara Harta Bersama yang masih dalam Penguasaan Perbankan.

ABSTRACT

“JURIDICAL ANALYSIS OF THE RULING OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 64/PUU-X/2012 CONCERNING THE EXCEPTION OF BANK SECRETS ON SETTLEMENT OF JOINT PROPERTY MATTERS”

**NESA HADI SUSANTO
NIM: 82337220011**

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia issued MK Decision Number 64/PUU protection of property under his control and must not be taken over arbitrarily by anyone).

This research was conducted using a normative juridical approach, because it aims to examine legal principles, legal systematics and legal comparison, in order to analyze whether certain normative postulates can or cannot be used to resolve certain legal problems in concreto (*law in the form of a decision or judge's determination*), which aims to obtain an overview of the effectiveness of the Constitutional Court's decision, which apparently still has many obstacles in its implementation due to the public's and banks' ignorance regarding the decision, besides that there are also overlapping rules which make the decision ineffective for the settlement of joint assets which are still in control. banking. In the case of dividing joint assets in the form of savings which are controlled by one of the parties, the case can be resolved because bank confidentiality can be opened, but with regard to joint assets which are still under the control of the banking sector, especially for Indonesian people who are predominantly Muslim, this is binding on the Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2018 in point III (Religious Chamber Formulation) paragraph (1d).

Efforts that can be made by the parties to obtain justice in resolving joint property cases that are still under banking control include holding discussions between the husband and wife to resolve the case outside of court, or entering into an agreement to separate assets before the divorce is carried out. Apart from that, the role of the Government is also urgently needed in issuing new regulations to strengthen the content contained in the decision, as a breakthrough or solution so as to fulfill justice, certainty and legal benefits for each party in cases related to the division of joint assets after divorce.

Keywords: Constitutional Court Decision Number 64/PUU-X/2012, Bank Confidentiality Regarding Joint Assets, Settlement of Joint Property Cases which are still in Banking Control.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dadi, M.Si., selaku Rektor Universitas Galuh
2. Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.,selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Galuh.
3. Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Hukum Universitas Galuh.
4. Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Yogi Muhammad Rahman, S.H., M.H., selaku Pembimbing II.
5. Hj. Y. Nuriyah, S.H., selaku Kabag Tata Usaha beserta Jajaran Tata Usaha Pasca Sarjana Universitas Galuh
6. Seluruh Dosen Program Pascasarjana dan S1 Fakultas Hukum Universitas Galuh yang selama ini telah memberikan ilmu, nasihat dan arahan.

7. Para Orang Tua, Anak dan Istri Tercinta, Saudara juga Kerabat yang selama ini telah memberikan dukungan dan do'a.
8. Para Sahabat yang telah memberikan support juga dukungan.

Penulis menyadari bahwa tidak ada karya tulis yang sempurna, begitu juga dengan Tesis ini, memiliki banyak kekurangan sehingga membutuhkan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun guna perbaikan tulisan dari Tesis ini dan penulisan – penulisan karya selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap Tesis ini dapat bermanfaat juga dapat menjadi bahan masukan juga referensi khususnya dibidang hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang dibahas dalam tulisan ini. Semoga kebaikan senantiasa menyertai kita semua. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ciamis, Juli 2024

Nesa Hadi Susanto

NIM :82337220011

DAFTAR ISI

Halaman	
Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan	ii
Pernyataan.....	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Kegunaan Penelitian	7
1.5. Sistematika Penulisan	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA, PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN, KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka	10
2.1.1. Tinjauan Harta Bersama Secara Umum ...	10
2.1.2. Harta Benda Bersama Berdasarkan Hukum Adat	14

2.1.3. Harta Benda Bersama Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan	18
2.1.4. Tata Cara Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian	21
2.1.5. Tinjauan Umum Tentang Produk Perbankan Dan Harta Bersama Dibawah Penguasaan Perbankan	23
2.1.6. Tinjauan Umum Tentang Kerahasiaan Bank	.36
2.1.7. Sejarah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012	57
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan	66
2.3 Kerangka Pemikiran	69

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Yang Digunakan	81
3.2 Alat Pengumpul Data	85
3.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	88
3.3.1. Teknik Pengolahan Data	88
3.3.2. Analisis Data	89
3.4 Tempat dan Waktu Penelitian	90
3.4.1. Tempat Penelitian	90
3.4.2. Waktu Penelitian	90

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	91
4.1.1. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Yang Telah Melaksanakan Perceraian Terhadap Harta Bersama Yang Menjadi Bagian Dari Produk Perbankan.....	91
4.1.2. Penyelesaian Perkara Atas Harta Bersama Yang Dijadikan Objek Jaminan Diperbankan Setelah Perceraian.....	97
4.2. Pembahasan	100

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	109
5.2 Saran	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN